

Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang dan Tantangan dari Kerja Sama Internasional

Asep Setiawan^{1,*}, Usni², Surwandono³, Dinar Meidiana⁴, Mansyur Syakban⁵

¹Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, Banten 15419

²Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, Banten 15419

³Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

⁴Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, Banten 15419

⁵Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, Banten 15419

*asep.setiawan@umj.ac.id

ABSTRAK

Keputusan untuk memindahkan ibu kota Indonesia atau Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki konsekuensi yang luas yang akan dirasakan di semua dimensi. Karena Indonesia memainkan peran penting dalam konteks global dan regional, keberhasilan upaya ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat internasional. Studi ini menyelidiki seluk-beluk peluang dan isu-isu yang terkait dengan kerja sama internasional dalam skema pemindahan ibu kota Indonesia. Studi ini menggunakan konsep kerja sama internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pentingnya kerja sama internasional ini. Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama internasional dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia membuka peluang interaksi di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan bahkan politik. Di sisi lain, kerja sama internasional juga memiliki risiko tersendiri, seperti ekspektasi masyarakat internasional terhadap kondisi yang harus dipenuhi selama pembangunan ibu kota baru. Pertimbangan lingkungan dan keamanan termasuk dalam peraturan ini.

Kata Kunci: ibu kota, relokasi, kerjasama, internasional, investasi

ABSTRACT

The decision to relocate Indonesia's capital has far-reaching consequences that will be felt across all dimensions. Because Indonesia plays such a significant role in both global and regional contexts, the success of this endeavour is dependent on the international community's active participation. This study investigates the intricacies of the opportunities and issues associated with international collaboration on Indonesia's capital relocation scheme. This study employs the concept of international cooperation by employing a qualitative approach to explore the significance of this international collaboration. According to the study's results, international collaboration in the creation of Indonesia's new capital city provides opportunities for interactions in the economic, social, technological, and even political domains. International collaboration, on the other hand, has its own set of risks, such as the international community's expectations for conditions to be satisfied during the development of the new capital city. Environmental and safety considerations are included in these regulations.

Keywords: capital city, relocation, cooperation, international, investment

1. PENDAHULUAN

Media Keputusan untuk memindahkan ibu kota Indonesia pada tahun 2022 merupakan kebijakan besar yang membutuhkan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang kuat, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. (Kamal, M. :2022). Namun, cakupan proyek ini melampaui batas-batas negara, sehingga membutuhkan kerja sama dan kerjasama di seluruh dunia. Pemindahan ibu kota Indonesia memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kemakmuran ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Kerjasama internasional dapat sangat membantu mencapai tujuan-tujuan ini dengan memberikan ide-ide dan pengetahuan penting dari inisiatif pemindahan ibu kota yang sukses di seluruh dunia. (Mujiono, D. I. K., & Sagen, U. W. :2020).

Salah satu aspek penting di mana kerja sama internasional dapat memainkan peran penting adalah dalam bidang perencanaan kota (Hawali, N. F. : 2023, Ristanto, D.A., Jatayu, A., & Sihotang, R. (2022). Indonesia dapat menggunakan teknik-teknik baru untuk membangun ibu kota yang dirancang dengan baik dan berfungsi dengan baik untuk menjawab tantangan antara lain penduduk yang padat di ibu kota lama dengan menggunakan praktik-praktik terbaik internasional. Kerjasama dengan para ahli dan organisasi asing dapat memberikan ide-ide baru mengenai pembangunan kota yang berkelanjutan, menjamin bahwa ibu kota baru dibangun dengan prinsip-prinsip pertumbuhan yang cerdas, sistem transit yang efisien, dan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Partisipasi internasional dalam inisiatif pemindahan ibu kota tampaknya menciptakan manfaat ekonomi juga. Menarik investasi asing langsung dan membentuk aliansi dengan perusahaan multinasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Lembaga-lembaga keuangan internasional dapat menawarkan bantuan keuangan dan keahlian, memperkuat upaya Indonesia

untuk menciptakan ibu kota baru yang dinamis dan berkembang. Selain itu, kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemindahan ibu kota. Kerjasama dengan mitra asing dapat membantu mempercepat analisis dampak lingkungan, mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, dan mendorong desain infrastruktur yang tahan iklim. Indonesia dapat membatasi kemungkinan konsekuensi negatif dari urbanisasi, mengurangi emisi karbon, dan melindungi sumber daya alam dengan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman global.

Dimensi sosial dan budaya dari proyek pemindahan ibu kota juga dapat memperoleh manfaat dari kerja sama internasional. Melestarikan warisan budaya Indonesia yang kaya sambil merangkul modernitas membutuhkan keseimbangan yang rumit. Kerjasama internasional dapat memfasilitasi pertukaran budaya, mendorong keterlibatan masyarakat yang inklusif, dan memastikan bahwa aspirasi dan nilai-nilai dari berbagai pemangku kepentingan terwakili secara memadai dalam proses perencanaan dan implementasi.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peluang dan tantangan kerjasama internasional yang beragam dalam konteks pemindahan ibu kota Indonesia, secara metodis menilai potensi dan kendala yang ada dalam upaya kerja sama tersebut. Dengan mengkaji secara kritis dinamika kerja sama internasional yang rumit dalam pemindahan ibu kota, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan berbagai faktor yang mendasari kerjasama yang berhasil. Dengan menggunakan studi kasus yang relevan dari proyek-proyek pemindahan ibu kota yang serupa, studi ini mengekstrapolasi wawasan yang berharga dan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang siap untuk memperkuat prinsip-prinsip kerja sama internasional dalam pemindahan ibu kota di Indonesia. Pada akhirnya, orkestrasi kemitraan internasional yang baik siap untuk menanamkan upaya ini dengan kesuksesan yang langgeng, beresonansi

dengan masa depan yang prospektif bagi ibu kota Indonesia yang baru.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendirian ibu kota baru sering kali menjadi ciri khas karakter dan pemerintahan suatu negara. Membangun ibu kota baru bukan hanya upaya lokal; biasanya mencakup hubungan canggih yang melintasi batas-batas negara. Pusat kekuasaan politik, aktivitas ekonomi, dan warisan budaya diwakili oleh ibu kota. Baru-baru ini, tren kerja sama internasional dalam pembangunan ibu kota telah berkembang, yang mencerminkan kesadaran bersama akan manfaat kerjasama dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Pendirian Astana di Kazakhstan sebagai ibu kota negara mencontohkan penggunaan strategi kerjasama internasional untuk mengubah kota yang sedang berkembang menjadi kota metropolitan yang modern. Melalui kemitraan dengan arsitek dan perencana kota ternama, Kazakhstan berusaha menciptakan simbol dari peningkatan status ekonomi dan politiknya.

Studi kasus Astana menunjukkan pengaruh signifikan dari kerjasama internasional dalam pembangunan ibu kota. Studi kasus Astana menunjukkan pengaruh signifikan dari kerjasama internasional dalam pembangunan ibu kota. Kazakhstan mengubah tujuan kemakmuran ekonomi dan politiknya menjadi realitas perkotaan yang nyata melalui kerjasama dengan arsitek dan perencana kota terkenal.

Kehadiran Astana menunjukkan kemampuan kerja sama internasional untuk membangun lingkungan perkotaan yang merepresentasikan kemunculan suatu negara di panggung dunia. (Köppen, B.: 2016 dan Trubina, E., & Kolesnik, D.: 2018).

Dalam kasus lainnya yakni Naypyidaw, ibu kota Myanmar, menjadi contoh interaksi antara diplomasi dan pembangunan kota. Pembangunan Naypyidaw adalah contoh nyata dari elemen diplomatik yang melekat dalam pembangunan ibu kota bersama. Studi kasus ini menggali peran penting dari

dukungan dan kerjasama China dalam menciptakan infrastruktur dan desain Naypyidaw, menerangi seluk-beluk dan kerumitan kerja sama pembangunan perkotaan internasional. Bangkitnya Naypyidaw sebagai ibu kota Myanmar ditandai dengan keterlibatan China secara komprehensif yang lebih dari sekadar bantuan infrastruktur.

Keterlibatan China tidak hanya mencakup dukungan finansial untuk proyek Naypyidaw, tetapi juga diplomasi canggih yang mendukung kerja sama tersebut. Kemitraan ini menjadi contoh arus diplomasi yang sering menyertai pembangunan perkotaan internasional.

Kontribusi China dalam pembangunan Naypyidaw sangat penting dalam penciptaan infrastruktur modern kota tersebut. Tujuan strategis di balik penciptaan jaringan transit, fasilitas administrasi, dan area publik yang penting adalah untuk memperkuat hubungan diplomatik. Kerjasama infrastruktur ini merupakan perwujudan praktis dari keterlibatan Myanmar dengan China, yang menunjukkan pertemuan antara tujuan diplomatik dan perubahan perkotaan.

Contoh lain dalam hal ini adalah pemindahan ibu kota Tanzania pada tahun 2016, yang menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menentukan jalur pembangunan perkotaan. Program ini menggunakan pengetahuan dari seluruh dunia untuk upaya revolusioner perkotaan melalui kemitraan kolaboratif dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kesulitan yang dialami, kompleksitas diplomatik yang diatasi, dan pelajaran yang didapat, semuanya menambah perbincangan mengenai penciptaan ibu kota kolaboratif, memberikan wawasan yang signifikan untuk inisiatif di masa depan. (Kessy, A. T.: 2022).

Afrika baru saja menyaksikan pembangunan ibu kota baru. Kisah Tanzania menyoroti kompleksitas diplomatik yang mendukung kerjasama internasional yang efektif dalam inisiatif perkotaan. Diplomasi yang efektif menjadi komponen penting dalam mengelola berbagai tujuan, kepentingan, dan dinamika kekuasaan yang terlibat dalam

inisiatif tersebut. Negara-negara dapat membangun kerjasama yang bermanfaat dan berdaulat dengan merangkul diplomasi sebagai komponen yang melekat dalam urbanisasi kolaboratif.

Pemindahan ibu kota Nigeria pada tahun 1991 menunjukkan dampak transformasional dari kerjasama internasional dalam pembangunan perkotaan. Nigeria melakukan perjalanan yang mengintegrasikan tujuan lokal dengan pengetahuan global melalui kemitraan kreatif dan partisipasi pemangku kepentingan. Rintangan yang dihadapi, teknik yang digunakan, dan pencapaian yang diperoleh menambah diskusi saat ini tentang penciptaan ibu kota kolaboratif, meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana kerjasama internasional dapat mempengaruhi lingkungan perkotaan. (Kirey, R. E. :2022).

Keterlibatan internasional tidak dapat dihindari berdasarkan pengalaman beberapa negara dalam membangun ibu kota baru. Namun, skala keterlibatan masyarakat internasional sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Dengan meningkatnya ketergantungan terhadap suatu negara, seperti yang terjadi di Myanmar, ada beberapa implikasi yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap dukungan finansial dan teknis setelah kota baru didirikan.

KERANGKA TEORI

Beberapa konsep mungkin relevan untuk dipertimbangkan dalam memahami dinamika kerjasama internasional dalam pembangunan ibu kota baru. Kerangka kerja teoritis memberikan wawasan yang berguna untuk memahami masalah-masalah ini dan membantu dalam memahami proses yang mendasari upaya kerja sama internasional. Bagian ini menyelidiki pendekatan teoritis utama dan menganalisis isu-isu kerjasama internasional.

Perspektif realis menyoroti tantangan yang diberikan oleh politik kekuasaan dalam kerjasama internasional. Menurut teori realis, negara-negara didorong oleh kepentingan pribadi dan ingin memaksimalkan kekuasaan dan keamanan mereka. (Mearsheimer, 2001; Waltz,

1979). Kesenjangan kekuasaan dan persaingan negara dapat menghambat kerjasama dengan memungkinkan negara yang lebih kuat untuk mendominasi proses pengambilan keputusan atau mengejar kepentingan nasional mereka sendiri dengan mengorbankan upaya kolaboratif. Perebutan kekuasaan ini dapat menyebabkan konflik, ketidakpercayaan, dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Masalah tindakan kolektif merupakan tantangan utama dalam kerja sama internasional. Teori pilihan rasional menekankan bahwa negara-negara terlibat dalam kerja sama ketika manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Namun, masalah koordinasi, *free-riding*, dan kurangnya mekanisme untuk menegakkan kerja sama dapat menghambat tindakan kolektif. (Olson, 1965; Ostrom, 1990). Dilema muncul ketika masing-masing negara menghadapi insentif untuk membelot dari upaya kerja sama, yang mengarah pada hasil yang tidak optimal bagi semua pihak.

Sudut pandang konstruktivis menekankan pentingnya norma-norma dalam membentuk kerja sama internasional. Norma adalah gagasan dan harapan yang dipegang secara luas yang membentuk perilaku negara. (Finnemore & Sikkink, 1998; Risse, Ropp, & Sikkink, 1999) Namun, kesulitan muncul ketika standar-standar tersebut ditentang atau ketika kerangka kerja normatif pemerintah tidak sejalan. Standar yang saling bertentangan dan interpretasi yang berbeda atas prinsip-prinsip normatif dapat menghambat kerjasama dengan membangun penghalang untuk mencapai konsensus dan kerja sama.

Dalam kerja sama internasional, pendekatan liberal menekankan pada masalah yang ditimbulkan oleh saling ketergantungan yang kompleks. Keterkaitan dan ketergantungan antar negara melalui saluran yang berbeda, seperti perdagangan, keuangan, dan komunikasi, disebut sebagai saling ketergantungan yang kompleks. (Keohane & Nye, 1977; Ruggie, 1992).

Meskipun ketergantungan dapat membuka jalan baru untuk kerjasama, hal ini juga membawa masalah baru.

Guncangan ekonomi, efek limbah, dan dampak eksternal membuat negara rentan, sehingga mempersulit upaya kerja sama. Desain dan efektivitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam kerja sama internasional. Meskipun lembaga-lembaga internasional menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama, ada tantangan dalam desain dan fungsinya. Isu-isu seperti representasi yang tidak setara, kurangnya sumber daya, dan inefisiensi birokrasi dapat menghambat efektivitas lembaga dalam mempromosikan kerja sama. Selain itu, legitimasi dan otoritas lembaga-lembaga tersebut dapat dipertanyakan, terutama ketika lembaga-lembaga tersebut dianggap bias atau didominasi oleh negara-negara kuat (Abbott, Keohane, & Moravcsik, 2000; Young, 1994).

Politik domestik dan batasan-batasan merupakan hambatan bagi kerjasama internasional. Dinamika politik dalam negeri, opini publik, kelompok kepentingan, dan sistem kelembagaan semuanya berdampak pada bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan luar negeri. Pertimbangan domestik dapat menghambat kerja sama dengan memprioritaskan kepentingan domestik yang sempit di atas tujuan kolektif atau membatasi kemampuan negara untuk berkomitmen pada upaya kerja sama.

Globalisasi dan masalah transnasional memperumit kerja sama internasional. Perubahan iklim, pandemi, terorisme, dan migrasi merupakan isu-isu yang melampaui batas-batas negara dan membutuhkan solusi kolaboratif. Namun, perbedaan kepentingan, perbedaan kebijakan, dan berbagai kapasitas negara dapat menghambat upaya untuk mengatasi masalah global ini. (Giddens, 2009; Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999).

Para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan kompleksitas yang terlibat dengan mengandalkan sudut pandang realis, pilihan rasional, konstruktivis, dan liberal. Wawasan teoritis ini dapat membantu membentuk strategi, institusi, dan kebijakan yang dapat meningkatkan kemungkinan kerjasama internasional yang efektif. (Held, 2010; Slaughter, 2004).

Perbedaan budaya dan moral di berbagai negara menjadi penghambat kerjasama internasional. Asal-usul budaya, sistem politik, dan orientasi ideologi yang berbeda dapat menghasilkan prioritas dan sudut pandang yang berbeda. (Katzenstein, 1996; Huntington, 1993). Menjembatani kesenjangan ini, mengembangkan saling pengertian, dan menemukan kesamaan menjadi sangat penting untuk kerjasama yang sukses.

Kerjasama internasional mungkin menghadapi rintangan yang cukup besar karena keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kemampuan. Karena keterbatasan keuangan, teknologi, atau kelembagaan, negara-negara berkembang dan pemerintah dengan sumber daya yang rendah mungkin memiliki masalah dalam melaksanakan usaha kerjasama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan internasional, kegiatan peningkatan kapasitas, dan metode inklusif yang mempertimbangkan berbagai bakat. (Snidal, 2002; Keck & Sikkink, 1998).

Isu lain yang harus ditangani adalah bagaimana isu keamanan dan kurangnya kepercayaan dapat menghambat kerja sama internasional. (Jervis, 1978; Kydd, 2000) Negara-negara mungkin ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam usaha kerja sama karena kekhawatiran akan potensi ancaman keamanan, ketidakpastian, atau ketakutan akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Mengatasi kebingungan keamanan dan menumbuhkan kepercayaan di antara pemerintah sangat penting untuk menciptakan suasana yang dapat menerima upaya-upaya kerjasama.

Pergeseran sifat ancaman keamanan membuat kerjasama internasional menjadi sulit. Terorisme, serangan siber, kejahatan terorganisir internasional, dan pandemi adalah contoh-contoh tantangan keamanan non-tradisional yang memerlukan solusi bersama. (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; UN Global Counter-Terrorism Strategy, 2006).

Masalah lain yang harus ditangani dalam kerjasama internasional adalah dampak dari masalah hukum dan kepatuhan terhadap kerja sama internasional. Keinginan dan kemampuan negara untuk mematuhi kesepakatan

internasional, perjanjian, dan kewajiban hukum berbeda-beda. Masalah-masalah dalam penegakan, pemantauan, dan akuntabilitas dapat terjadi, sehingga mengurangi keefektifan kemitraan kerja sama. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, sangat penting untuk memperkuat sistem kepatuhan dan resolusi konflik. (Abbott, Genschel, Snidal, & Zangl, 2015; Helfer, 2004).

Kesenjangan komunikasi dan informasi juga dapat menghambat kerja sama internasional. Kerja sama yang efektif bergantung pada pertukaran informasi, transparansi, dan dialog terbuka. Tantangan muncul ketika ada asimetri dalam akses ke informasi, kesalahan persepsi, atau saluran komunikasi yang tidak memadai di antara para aktor yang berpartisipasi. Meningkatkan komunikasi, berbagi pengetahuan, dan menjembatani kesenjangan informasi dapat memfasilitasi kerja sama (Gartzke & Rohner, 2011; Haas, 1992).

Secara umum, kerja sama internasional melibatkan interaksi yang kompleks dan tata kelola yang bertingkat. Keterkaitan isu-isu global membutuhkan kerjasama tidak hanya di antara negara tetapi juga di antara berbagai tingkat tata kelola, termasuk organisasi regional, entitas subnasional, dan aktor non-negara. Mengkoordinasikan berbagai tingkat tata kelola dan menyelaraskan tujuan mereka dapat menjadi tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan mekanisme yang efektif untuk kerja sama, berbagi informasi, dan pengambilan keputusan (Biermann et al., 2009; Bulkeley, Andonova, Betsill, Compagnon, & Hale, 2014).

Selain itu, kontestasi norma dan asimetri kekuasaan merupakan tantangan yang muncul dalam kerja sama internasional. Aktor-aktor yang berbeda dapat memiliki norma, nilai, dan kepentingan yang berbeda, yang mengarah pada benturan dan konflik atas interpretasi dan penerapan norma. Asimetri kekuasaan di antara negara-negara juga dapat membentuk dinamika kerja sama, yang mempengaruhi kemampuan negara yang lebih kecil atau kurang kuat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam

proses pengambilan keputusan (Barnett & Duvall, 2005; Risse-Kappen, 1995).

Dapat juga dipertimbangkan bahwa konflik distribusi dan ekonomi politik kerja sama dapat menjadi tantangan bagi kerja sama internasional. Negara-negara mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda dan menghadapi tekanan domestik untuk melindungi industri atau sektor tertentu. Negosiasi mengenai isu-isu seperti perdagangan, peraturan keuangan, atau bantuan pembangunan sering kali melibatkan penyeimbangan kepentingan ekonomi yang saling bersaing, yang dapat mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Milner & Keohane, 1996; Simmons, 2001).

Aspek lain yang mungkin perlu diperhatikan adalah pertimbangan etika dan nilai-nilai yang memainkan peran penting dalam kerja sama internasional. Ketidakepakatan mengenai prinsip-prinsip etika, hak asasi manusia, dan nilai-nilai budaya dapat menghambat kerja sama, terutama ketika pertimbangan-pertimbangan tersebut berbenturan dengan kepentingan negara atau norma-norma yang ada. Menyeimbangkan perspektif dan nilai etika yang beragam menjadi penting dalam mengembangkan pendekatan kerja sama yang menghargai kerangka moral yang berbeda (Koenig-Archibugi, 2004; Wendt, 2003).

Kemajuan teknologi dan era digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi kerja sama internasional. Perubahan teknologi yang cepat, seperti munculnya kecerdasan buatan, ancaman keamanan siber, atau tata kelola data, membutuhkan tanggapan yang kooperatif. Namun, perbedaan kemampuan teknologi, kesenjangan digital, dan kerangka kerja peraturan yang berbeda dapat menghambat kerja sama yang efektif di bidang-bidang ini (Nye, 2010; DeNardis, 2014).

Dari perspektif teoritis, kerja sama internasional menyediakan skema dimana negara atau institusi lain dapat berperan secara signifikan dalam proyek internasional. Namun, beberapa hambatan dapat muncul dari beberapa aspek seperti ekonomi, politik, dan keamanan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang masalah ini. Desain penelitian ini menggabungkan banyak penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap sumber-sumber informasi sekunder. Pengumpulan data sekunder didasarkan pada buku-buku ilmiah, artikel jurnal yang telah ditelaah oleh rekan sejawat, laporan yang tersedia untuk umum, dan dokumen resmi dari pemerintah. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada pengetahuan yang telah mapan, konteks historis, dan wawasan yang terdokumentasi dari sumber-sumber tersebut. Penelitian ini ingin memastikan bahwa hasilnya kredibel dan dapat diandalkan, sehingga mendapatkan informasi dari sumber-sumber akademis dan pemerintah yang memiliki reputasi baik.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kerjasama internasional memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan akses ke praktik-praktik terbaik dan pendekatan baru dalam perencanaan kota dan pembangunan berkelanjutan. Dengan bermitra dengan para ahli dari seluruh dunia, Indonesia akan dapat memanfaatkan studi kasus yang berhasil dan pelajaran yang diperoleh untuk merencanakan dan membangun ibu kota baru yang dirancang dengan baik dan fungsional. Kemitraan ini dapat mencakup hal-hal seperti perencanaan tata guna lahan, jaringan transportasi, komunikasi, pembangunan perumahan dan gedung perkantoran, dan integrasi ruang hijau. Mitra internasional dapat memberikan pengetahuan di bidang-bidang seperti kota dengan pertumbuhan yang cerdas, ketahanan kota, dan desain kota yang inklusif, untuk memastikan bahwa ibu kota baru dapat memenuhi kebutuhan warganya dengan dampak lingkungan yang sekecil mungkin.

Pembangunan IKN membutuhkan sumber daya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas

internasional. Keterbatasan dana pemerintah untuk merealisasikan infrastruktur awal karena mengejar ulang tahun kemerdekaan pada Agustus 2024 membuat sumber daya dalam negeri tidak mencukupi.

Tahapan pembangunan dibagi menjadi lima bagian untuk menyelesaikan proyek pada tahun 2045. Progres pembangunan Tahap 1 IKN telah mencapai 29 persen dari pembangunan infrastruktur dasar, termasuk menara hunian, jalan tol, dan gedung pemerintah pusat, pada Mei 2023. Setelah beberapa tahun pembangunan, proyek ini akan memakan total anggaran sekitar USD 32,7 miliar untuk menyelesaikannya. Karena sekitar 80% dari dana tersebut diproyeksikan berasal dari modal swasta, proyek ini memberikan peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperluas operasinya di Indonesia Timur atau mereka yang ingin berinvestasi di bidang infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan perumahan di Indonesia.

(edelmanglobaladvisory.com)

Proyek ini telah menerima minat yang signifikan dari para pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di IKN untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menerima 209 surat minat, di mana 36 di antaranya telah menandatangani perjanjian kerjasama.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penerapan peraturan khusus untuk pembiayaan IKN, insentif investasi, dan perencanaan pembangunan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mempercepat pertumbuhan proyek.

Otoritas Investasi dan Pengembangan Kawasan Nusantara (OIKN) melaporkan telah menerima 284 Letter of Intent (LoI), atau janji awal untuk berinvestasi di kawasan Nusantara, hingga September 2023. Terdapat 284 LoI (Letter of Intent) dari 21 negara yang berbeda. Agung Wicaksono, Deputy Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, menyatakan bahwa banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Untuk

berinvestasi di IKN, harus melalui delapan tahapan: Pengajuan LOI, pertemuan empat mata, surat tanggapan, studi kelayakan, penelaahan dan penentuan prioritas LOI, surat konfirmasi, NDA dan Data Request, dan Deal Closing. Dengan pertumbuhan ini, diharapkan investor asing akan berbondong-bondong masuk ke IKN untuk membangun smart city, energi baru terbarukan (EBT), dan perumahan.

Kerja sama dengan China telah menarik minat internasional. Pada 27 Juli 2023, Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mitranya dari China, Xi Jinping, di Chengdu, China, dan kedua negara menandatangani delapan kesepakatan, termasuk nota kesepahaman (MoU) tentang transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan IKN. Meski belum ada data yang terungkap terkait jumlah investasi China di IKN, namun nampaknya dengan kerja sama yang sudah terjalin selama ini seperti di pertambangan Nikel, China akan banyak terlibat dalam pengembangan IKN. China antara lain fokus membangun IKN sebagai smart city termasuk dalam membangun infrastruktur pendukungnya. Isu smart city menjadi jalan bagi investor asing untuk ikut mengembangkan IKN.

Finlandia juga menawarkan keahliannya dalam membangun ibu kota baru Indonesia melalui apa yang disebut Smart City Innovation Cluster (SCIC). Untuk mengimplementasikan hal ini, Indonesia dan Finlandia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). (en.tempo.co). Program kerja sama ini tampaknya berfokus pada kerangka kerja pengembangan, perencanaan dan pembangunan kota pintar di IKN. Kerjasama ini akan mengintegrasikan solusi untuk banyak hal, termasuk energi, transfer data, bangunan pintar, area pintar, kota pintar, konsumsi energi, dan pengelolaan limbah air.

Sementara itu, Korea Selatan dan Indonesia bekerja sama dalam proyek IKN yang pada tahun 2019 ini memiliki kesepakatan proyek senilai 32 miliar dolar. Kesepakatan ini diperbaharui pada tahun 2022 dengan fokus membangun berbagai proyek termasuk sistem penyediaan air bersih. Masuknya Korea Selatan ke dalam

proyek IKN merupakan bagian dari berbagi pengalaman saat membangun kota administratif Sejong pada tahun 2012. Pada tanggal 28 Juli 2022, Indonesia memperluas perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan pada hari Kamis terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan untuk menggantikan Jakarta yang penuh sesak, membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan Korea untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur digital. Kedua negara awalnya menandatangani perjanjian pada tahun 2019 untuk bekerja sama dalam proyek ambisius senilai \$32 miliar, di mana Indonesia akan memindahkan ibu kotanya ke Nusantara. (thepost.com).

Pada tahun 2022, Finlandia dan Spanyol juga telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama membangun IKN. Finlandia membawa sejumlah perusahaan besar dalam pertemuan dengan pihak Indonesia seperti Betolar, KONE, dan Wärtsilä. (en.tempo.co).

Pembangunan IKN juga melibatkan Asian Development Bank (ADB) untuk memetakan upaya IKN menjadi kota netral karbon pada tahun 2045 berdasarkan konsep kota hutan lestari.

Dengan adanya peluang yang ditawarkan oleh dunia internasional, sejumlah proyek infrastruktur akan mendapat dukungan internasional. Negara-negara Eropa menekankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengubah hutan di Kalimantan Timur menjadi kota baru. Bagi negara-negara Barat, ini adalah pintu masuk bagi apa yang disebut sebagai kota ramah lingkungan dan kota pintar untuk muncul.

Proyek pemindahan ibu kota Indonesia juga memberikan peluang bagi diplomasi politik dan keterlibatan multilateral. Berkerjasama dengan negara-negara tetangga, organisasi regional, dan mitra internasional dapat membina hubungan diplomatik, meningkatkan kerja sama, dan mempromosikan saling pengertian. Terlibat dalam dialog dan negosiasi diplomatik dapat mengatasi potensi konflik, memastikan transisi yang lancar, dan membangun aliansi yang kuat

untuk mendukung proyek pemindahan ibu kota.

Meskipun kerjasama internasional memberikan beberapa potensi untuk proyek pemindahan ibu kota, kerjasama ini juga menghadirkan masalah dan kekhawatiran yang signifikan. Menyeimbangkan kepentingan dan kedaulatan nasional dengan kerjasama internasional memerlukan navigasi yang cermat dan pembangunan konsensus pemangku kepentingan. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara memanfaatkan pengalaman internasional dan menjaga kedaulatan pengambilan keputusan Indonesia.

Di sisi lain, masalah perencanaan kota dalam konteks kerjasama internasional tidak boleh diabaikan. Perbedaan budaya, sistem hukum yang beragam, dan agenda yang saling bersaing dapat menyulitkan kerjasama yang sukses. Indonesia harus menemukan keseimbangan antara mengadopsi praktik-praktik terbaik dari luar negeri dan melestarikan karakter budayanya sendiri. Koordinasi di antara banyak pemangku kepentingan, baik lokal maupun internasional, juga diperlukan untuk menjamin bahwa proses perencanaan kota sejalan dengan kebutuhan dan ambisi masyarakat Indonesia.

Memang benar bahwa kerjasama internasional dalam inisiatif pemindahan ibu kota memberikan Indonesia banyak pilihan komersial. Kerjasama dengan investor, perusahaan, dan lembaga keuangan internasional dapat membantu mempercepat investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ibu kota baru memiliki potensi untuk menjadi pusat bagi berbagai sektor, menarik perusahaan-perusahaan domestik dan asing yang ingin membangun bisnis di wilayah ini. Indonesia dapat memperoleh akses ke pasar global, meningkatkan hubungan perdagangan, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan melalui aliansi internasional.

Namun, untuk mengambil keuntungan dari manfaat ekonomi melalui kerjasama internasional, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tantangan-tantangan yang ada. Ini adalah usaha yang

sulit untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi nasional sambil tetap melindungi perusahaan dan industri lokal. Sangat penting bagi Indonesia untuk menciptakan prosedur yang mendorong iklim ekonomi yang adil dan merata, yang memungkinkan bisnis lokal untuk berkembang bersama investor internasional. Untuk menghindari meningkatnya ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial-ekonomi, penting juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang adil dan menguntungkan semua segmen masyarakat.

Kerjasama internasional, yang dibuktikan dengan berbagai komitmen dari berbagai negara, dapat memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim di ibu kota di masa depan. Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara kaya, terutama negara-negara di Eropa. Kerjasama dengan organisasi internasional, lembaga penelitian, dan profesional lingkungan dapat membantu melakukan penilaian dampak lingkungan yang efektif dan memasukkan praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan ke dalam desain dan pengelolaan kota. Berbagi pengetahuan dan alih teknologi dapat membantu Indonesia mengadopsi solusi pengelolaan limbah yang inovatif, energi terbarukan, konservasi air, dan pembangunan infrastruktur hijau.

Namun, tantangan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim harus diatasi melalui kerja sama internasional. Perubahan iklim merupakan isu global, dan dampak dari ibu kota baru terhadap lingkungan dan ekosistem lokal harus dikaji dengan cermat. Karena pembukaan hutan untuk industri penebangan kayu, Indonesia telah menjadi bahan kritikan negara-negara Eropa. Dan ibu kota baru dibangun dengan membuka hutan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, upaya koordinasi dengan mitra internasional dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko, menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, dan membangun kota yang tangguh terhadap iklim. Sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sama internasional dalam konteks ini selaras

dengan tujuan dan prioritas lingkungan hidup nasional Indonesia sambil memanfaatkan keahlian global.

Selain itu, kerja sama internasional juga membuka peluang untuk mengintegrasikan dimensi sosial dan budaya ke dalam proyek pemindahan ibu kota. Berkerjasama dengan organisasi budaya internasional, institusi akademik, dan kelompok masyarakat dapat memfasilitasi pelestarian dan perayaan warisan budaya Indonesia yang beragam di ibu kota baru. Bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara yang telah mengalami transformasi serupa dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai keterlibatan masyarakat, inklusivitas sosial, dan menumbuhkan rasa saling memiliki di antara penduduk.

Pengelolaan komponen sosial dan budaya dalam kerja sama internasional membutuhkan kepekaan dan toleransi. Menghormati tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan lokal sambil merangkul modernitas mungkin merupakan keseimbangan yang sulit untuk dicapai. Indonesia harus menjamin bahwa kegiatan kerja sama internasional mendorong keterlibatan masyarakat, keragaman budaya, dan keharmonisan sosial. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat selama proses relokasi, termasuk pengambilan keputusan dan perencanaan, untuk memastikan bahwa ibu kota baru mencerminkan ambisi dan identitas warganya.

Menghargai keragaman perspektif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif sangat penting untuk keberhasilan kerja sama internasional. Mengakui berbagai prioritas dan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dan secara aktif melibatkan mereka dalam tahap perencanaan dan implementasi dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan kerjasama. Dengan menghargai pengetahuan dan pengalaman lokal bersama dengan keahlian internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa proyek pemindahan ibu kota merupakan upaya kolektif yang bermanfaat bagi semua pihak.

Seiring dengan langkah Indonesia untuk melanjutkan proyek pemindahan ibu kota dan berupaya memperkuat kerja sama internasional, beberapa arahan dan rekomendasi di masa depan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama.

Untuk memfasilitasi kerja sama internasional, sangat penting untuk membangun platform dan mekanisme khusus untuk kerjasama. Platform ini dapat menyatukan organisasi internasional, para ahli, pemerintah, dan pemangku kepentingan lokal untuk bertukar pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan membina kemitraan. Pertemuan rutin, konferensi, dan lokakarya dapat menjadi forum diskusi dan kerja sama, yang memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan pendanaan.

Indonesia perlu proaktif terlibat dalam membangun kemitraan strategis dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan pemindahan ibu kota atau memiliki keahlian dalam perencanaan kota, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan. Melalui kemitraan ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik-praktik terbaik sambil membina hubungan diplomatik dan memperkuat kerja sama regional.

4. KESIMPULAN

Pemindahan ibu kota Indonesia merupakan sebuah usaha luar biasa yang membutuhkan banyak perencanaan, pengorganisasian, dan kerjasama. Belasan negara dan organisasi keuangan telah setuju untuk membangun ibu kota baru bagi Indonesia setelah dinyatakan bahwa Indonesia dapat memindahkan ibu kotanya. Sebagai hasil dari kerja sama internasional, ada beberapa peluang yang muncul untuk perencanaan kota, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan diplomasi politik. Dengan memanfaatkan pengalaman asing, pelajaran yang didapat dari upaya serupa, dan dialog diplomatik,

Indonesia dapat memperoleh akses ke informasi dan bantuan internasional.

Namun, keberhasilan inisiatif pemindahan ibu kota bergantung pada negosiasi kesulitan dan kompleksitas kerjasama internasional. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah menyeimbangkan kepentingan nasional, mempertahankan identitas budaya, menyelesaikan masalah lingkungan, dan menjamin partisipasi yang adil. Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan dari kerjasama internasional dan membangun ibu kota yang mencerminkan ambisi dan nilai-nilai masyarakatnya dengan menjaga jalur komunikasi yang terbuka, mendorong proses pengambilan keputusan yang partisipatif, dan mengembangkan kemitraan yang kuat.

Selain menjadi inisiatif revolusioner bagi Indonesia, proyek pemindahan ibu kota ini juga menjadi kesempatan untuk menyoroti dedikasi bangsa ini terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, keberhasilan ekonomi, dan keterlibatan internasional. Dengan dukungan dan bantuan komunitas internasional, Indonesia dapat memulai perjalanan bersejarah ini dengan merangkul kerja sama dan kerjasama internasional, menciptakan model pemindahan ibu kota yang efektif dan pertumbuhan perkotaan di seluruh dunia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, K. W., Keohane, R. O., & Moravcsik, A. (2000). The Concept of Legalization. *International Organization*, 54(3), 401-419.

Appleyard, R. (2009). *Planning a Capital City: The Challenges of Canberra*. The Royal Australian Planning Institute.

Boin, A., McConnell, A., & Hart, P. T. (2008). *Crisis Management and Decision Making: Simulation*

Oriented Scenarios for Training. Cambridge University Press.

- Checkel, J. T. (2005). International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework. *International Organization*, 59(4), 801-826.
- Durrani, M. (2018). *The Transformation of Astana: A Role Model for Capital Cities*. City Metric.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Gartzke, E., & Rohner, D. (2011). To Conquer or Compel: War, Peace, and Economic Development. *The Journal of Peace Research*, 48(6), 677-692.
- Giddens, A. (2009). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Ghosh, D. (2019). *China's Role in the Making of Myanmar's New Capital*. Observer Research Foundation.
- Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. *International Organization*, 46(1), 1-35.
- Held, D. (2010). *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*. Polity Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Stanford University Press.
- Helfer, L. R. (2004). Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking. *Yale Journal of International Law*, 29(1), 1-83.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22-49.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Htwe, Y. M. (2015). Naypyidaw: Constructing a New Capital for Myanmar. *Journal of Southeast Asian Architecture*, 15, 66-77.
- Hawali, N. F. (2023). *Urban Politics of Land in Planning The New Capital City Nusantara of*

- Indonesia (Doctoral dissertation, Columbia University).
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Kirey, R. E. (2022). A Long Way to Dodoma: Deconstructing Colonial Legacy by Relocating the Capital City in Tanzania. *Tanzania Zamani*, 12(1).
- Katzenstein, P. J. (1996). Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan. Cornell University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The Regime Complex for Climate Change. *Perspectives on Politics*, 9(1), 7-23.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown.
- Kydd, A. H. (2000). Trust, Reassurance, and Cooperation. *International Organization*, 54(2), 325-357.
- Kamal, M. (2022). Prospects for the New Capital City Policy in Law and Economic Perspectives. *Substantive Justice International Journal of Law*.
- Köppen, B. (2016). The production of a new Eurasian capital on the Kazakh steppe: architecture, urban design, and identity in Astana. In *From Socialist to Post-Socialist Cities* (pp. 104-119). Routledge.
- Kessy, A. T. (2022). The Long Waiting for Relocating Capital City in Tanzania: The Continuity of the Game Changer and the Challenges Ahead. *The African Review*, 49(1), 54-73.
- Kirey, R. E. (2022). A Long Way to Dodoma: Deconstructing Colonial Legacy by Relocating the Capital City in Tanzania. *Tanzania Zamani*, 12(1).
- Mujiono, D. I. K., & Sagena, U. W. (2020). Opportunities of international cooperation in relocating the new capital of Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, 1(1), 13-22.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2004). The Logic of Appropriateness. ARENA Working Paper, 22.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Nye, J. S. (2010). Cyber Power. *Journal of Strategic Studies*, 33(1), 5-18.
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Raine, M. (2016). *The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman*. Routledge.
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge University Press.
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: The Anatomy of an Institution. *International Organization*, 46(3), 561-598.
- Simmons, B. A. (2001). The International Politics of Harmonization: The Case of Intellectual Property Rights. *International Organization*, 55(3), 651-683.
- Trubina, E., & Kolesnik, D. (2018). From Astana to Nur-Sultan: On the construction of identity and power. *Journal of Political Power*, 11(3), 380-396.
- Ristanto, D.A., Jatayu, A., & Sihotang, R. (2022). Towards a sustainable new state capital (IKN): sustainable zoning plan formulation based on quantitative zoning approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1108.
- Slaughter, A.-M. (2004). *A New World Order*. Princeton University Press.
- Snidal, D. (2002). Rational Choice and International Relations. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons (Eds.), *Handbook of International Relations* (pp. 85-101). SAGE Publications.

- Young, O. R. (1994). *International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society*. Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Waveland Press.
- Wendt, A. (2003). Why a World State Is Inevitable. *European Journal of International Relations*, 9(4), 491-542.
- UN Global Counter-Terrorism Strategy. (2006). United Nations General Assembly Resolution 60/288. Retrieved from <https://www.un.org/en/counterterrorism/ctitf-un-global-counter-terrorism-strategy>
- Navigating Investment Opportunities and Challenges in Indonesia's New Capital City. <https://www.edelmanglobaladvisory.com/insights/investment-opportunities-and-challenges-in-Indonesia-New-Capital-City>.
- IKN Authority Receives 284 Initial Investment Commitments, Malaysia and China are Attracted. September, 13, 2023. <https://voi.id/en/economy/310241>.
- Finland Collaborates with Indonesia to Make Nusantara a Smart City. September 3, 2023. <https://en.tempo.co/read/1767611/finland-collaborates-with-indonesia-to-make-nusantara-a-smart-city>.
- Indonesia and South Korea expand cooperation on new capital city project. July 8, 2022. <https://www.thejakartapost.com/world/2022/07/28/indonesia-and-south-korea-expand-cooperation-on-new-capital-city-project.html>.
- Spain, Finland Express Interest in Indonesia's New Capital City IKN Development Cooperation. November 27, 2023. <https://en.tempo.co/read/1661734/spain-finland-express-interest-in-indonesias-new-capital-city-ikn-development-cooperation>.